**ABSTRAK**

 Kebijakan otonomi daerah yang mendesentralisasikan kewenangan pemerintah kepada pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dengan aspek desentralisasi fiskal. Namun ketika otonomi daerah di aplikasikan ada permasalahan pada desentralisasi fiskalnya, tidak seimbang antara desentralisasi kewenangan dengan desentralisasi keuangan atau ada fiskal gap. Pada situasi fiskal gap ada dan kekuatan utama fiskal daerah dari pendapatan asli daerah masih rendah, maka desentralisasi fiskal tidak dapat maksimal menghasilkan sumber pendanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disini diperlukan peran kepemimpinan Kepala Daerah sebagai leader dalam menutup fiskal gap, sehingga tidak mengorbankan pembangunan (publik). Beberapa ahli mengemukakan bahwa di Indonesia kepemimpinan itu menonjol, bahkan inovasi pemerintahan sekarang sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran kepemimpinan Kepala Daerah dalam memecahkan masalah guna mengefektifkan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

 Penelitian ini menggunakan pendekatan analisa kualitatif dengan single case study. Fokus penelitian menitikberatkan pada desentralisasi fiskal dan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dengan peran kepemimpinan Kepala Daerah dalam mengefektifkannya. Dengan lokasi penelitian pada penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Majalengka. Adapun informan dalam penelitian ini dari pemerintah daerah Dr. Karna Sobahi (Wakil Bupati), Ahmad Sodikin, MM. (Sekda), Dr.Edy Noor Sudjatmiko (Kepala DPKAD), Yayan Sumantri, M.Si (kepala Bappeda), Dr. Lalan Soeherlan (Inspektur), dari DPRD Dadan Dariswan, MM. (Wakil Ketua) dan Fuad Abdul Azid (Wakil Ketua Komisi II) serta expert judment Prof. Aries Djaenuri, Prof. Sutarman, Made Suwandi, Ph.D (Mantan Dirjen Otda) dan Aang Hamid Suganda, S.Sos (Mantan Bupati Kuningan).

 Hasil penelitian ini dapat mengungkap, bahwa : (1) Peran kepemimpinan Kepala Daerah yang progresif dengan dilandasi jiwa entrepreneurship, kreatif, inovatif dan visioner menjadi modal dasar dalam membangun untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat ; (2) Efektifitas desentralisasi fiskal, dengan memaksimalkan mobilisasi sumber pendanaan dan fokus program untuk kesejahteraan rakyat dan peningkatan PAD, dengan perbaikan pada hubungan keuangan pusat dan daerah; (3) Membangun daerah dengan fiskal terbatas, dengan memanfaatkan sumber pendanaan dari fiskal daerah yang diperoleh dari kewenangan desentralisasi fiskal dan dari modal partisipasi publik yang timbul dari kewenangan menjalankan otonomi daerah; (4) Mengukur keberhasilan pembangunan, dari pencapaian pertumbuhan ekonomi dan agar relevan dengan pembangunan daerah, diperlukan kebijakan desentralisasi ekonomi.

 Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu managemen, terutama managemen keuangan daerah, sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam mencapai daerah kinerja baik untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai komponen baru transfer dana perimbangan. Sekaligus sebagai sumbangsih untuk memperbaiki hubungan keuangan pusat dan daerah dalam memperkuat fiskal daerah.